# RISIKO PEMERIKSAAN HUBUNGANNYA DENGAN DETEKSI KECURANGAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Oleh:

Muhammad Yovankha P. Nasution<sup>1</sup>
Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>
Inggriani Elim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

> email: <sup>1</sup>yovan.nasution@gmail.com <sup>2</sup>jantje788@gmail.com <sup>3</sup>e inggriani@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Risiko pemeriksaan adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Terdapat suatu seksi tersendiri yang membahas mengenai risiko audit dan materialitas dalam Standar Auditing yaitu Seksi 312 PSA No. 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rumusan risiko audit pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 dan mengetahui hubungan antara pemberlakuan rumusan risiko audit dengan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan penerapan rumusan risiko audit pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan praktik yang sehat, serta pemberlakuan rumusan risiko audit tersebut dapat meminimalisir resiko deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. Saran penulis kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut agar mempertimbangkan hasil observasi pemeriksa dalam menerapkan kuisioner kontrol internal dan metode ilustratif COSO serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut kepada para pemeriksa terkait langkah-langkah penilaian dan penetapan risiko pemeriksaan terhadap entitas yang diperiksa.

Kata kunci: risiko pemeriksaan, deteksi kecurangan, laporan keuangan

#### **ABSTRACT**

DAN BISNIS Audit risk is the risk that arises because the auditor does not modify his/her opinion unnoticed as it should, of a financial statements that contain material misstatement. There is a separate section that discussed the audit risk and materiality in Auditing Standards which is Section 312 AU No.25. This research aimed to determine the application of the audit risk formula of BPK RI Representative of North Sulawesi Province in performing Audit of Manado City Government's Financial Statement in 2012 and determine the relation between the application of the audit risk formula with fraud detection method in the Financial Statements of Manado City Government. Research method is descriptive quantitative Research results showed that the application of the audit risk formula of BPK RI Representative of North Sulawesi Province in performing Audit of Local Government's Financial Statements at Manado in 2012 has been in accordance with the applicable rules and sound practices, as well as the application of the audit risk formula can minimize the risk of fraud detection in performing Audit of Manado Local Government's Financial Statements. Author suggested BPK RI Representative of North Sulawesi Province to consider the auditor's observation result in implementing internal control questionnaires and COSO illustrative methods and conduct more intensive education and training to auditor's in accordance with risk assessment.

**Keywords:** audit risk, fraud detection, financial statements

#### **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Profesional Akuntan Publik menerbitkan suatu buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001, yang terdiri dari lima standar untuk menjamin pekerjaan pemeriksaan dilaksanakan secara profesional oleh para pemeriksa publik. Standar tersebut masih dilengkapi dengan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik.

Pentingnya pemahaman pemeriksa terhadap risiko audit dan materialitas di dalam melakukan pemeriksaan, maka terdapat suatu seksi tersendiri yang membahas mengenai risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit yaitu Standar Auditing Seksi 312 PSA No. 25. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Laporan keuangan mengandung salah saji material (material misstatement) apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji (misstatement) yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan (error) atau kecurangan (fraud). Istilah kekeliruan (error) berarti salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Istilah kecurangan (fraud) merupakan pengertian yang luas dari segi hukum, salah satunya adalah "kecurangan dan penyalahgunaan wewenang adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memperkaya dirinya sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau kesalahan dalam mengatur aset atau kekayaan" ((The Associaton of Certified Fraud Examiners (ACFE)).

Pemerintah Kota Manado merupakan salah satu entitas pemeriksaan dari enam belas entitas pemeriksaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut sejak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dibentuk pada tahun 2005. Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2005 s.d. 2012 cenderung menunjukkan opini yang kurang memuaskan dimana opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) sebanyak dua kali, opini tidak wajar (adverse opinion) sebanyak tiga kali, dan tidak memberikan opini (disclaimer opinion) sebanyak tiga kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado cenderung beresiko dan mengandung salah saji yang material. Penulis mencoba menguraikan bagaimana hubungan antara penilaian risiko pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa pada tahapan perencanaan pemeriksaan laporan keuangan dengan deteksi atas kemungkinan kecurangan pada laporan keuangan, khususnya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012.

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rumusan risiko audit pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 dan untuk mengetahui hubungan antara pemberlakuan rumusan risiko audit dengan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Landasan Teori

Penelitian ini menyajikan deskripsi teori yang mendukung penelitian sebagai bahan referensi, sehingga kesenjangan yang tercipta antara teori dan praktek yang dijalankan dalam obyek penelitian dapat ditemukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk solusi perbedaan tersebut dalam membuat saran yang baik, yang akan dijelaskan dalam uraian berikutnya.

#### Risiko Audit

Standar Auditing Seksi 312 PSA No. 25 menyebutkan bahwa risiko audit terdiri atas empat komponen yaitu:

- 1. Risiko audit (*audit risk*). Guy, et al. (1999:151) mendefinisikan risiko audit (*audit risk*) merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material;
- 2. Risiko bawaan (*inherent risk*) adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait;
- 3. Risiko pengendalian (*control risk*) adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas:
- 4. Risiko deteksi (*detection risk*) adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

Boyton, et al. (2002:338) mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut:

Risiko Audit = 
$$\frac{\text{Risiko}}{\text{Bawaan}}$$
 X Risiko Kontrol X Risiko Deteksi  $\frac{(Audit)}{Risk/AR}$  =  $\frac{(Inherent)}{Risk/IR}$  X  $\frac{(Control)}{Risk/CR}$  X  $\frac{(Detection)}{Risk/DR}$ 

## Fraud (Kecurangan) dalam Laporan Keuangan

Teknik-teknik deteksi awal adanya indikasi kecurangan sebagai berikut:

- 1. Fraud Red Flags (bendera merah kecurangan). Sebagian besar bukti fraud merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk awal fraud biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang., dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, atau perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan red flags (fraud indicators). Timbulnya red flags tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya fraud, namun red flags ini biasanya muncul di setiap kasus fraud yang terjadi. Kranacher, et al. (2011:186) menjelaskan beberapa jenis red flags yang dapat dikenali antara lain:
  - a. Accounting anomalies yakni apabila ditemukannya kondisi akuntansi yang tidak sebagaimana biasanya menjadi sinyal bagi auditor akan kemungkinan terjadinya fraud, seperti kesalahan dalam penjurnalan, ketidakakuratan dalam buku besar, dan ketidakberesan dokumen;
  - b. *Internal control weakness* yakni apabila pengendalian intern tidak ada atau apabila ada tetapi dikesampingkan, maka jelas *fraud triangle* menjadi nyata, dan risiko kemungkinan terjadi *fraud* semakin besar;
  - c. Analytical anomalies Merupakan prosedur dan hubungan yang tidak biasanya dan sangat tidak realistis meliputi transaksi atau peristiwa yang terjadi pada tempat atau waktu yang tidak biasanya. Sebagai contoh banyaknya memo debet/kredit, ketidakwajaran pengeluaran, ketekoran kas, atau meningkatnya pendapatan tetapi disertai dengan menurunnya piutang;
  - d. *Extravagant lifestyle* yakni tanda ketika terdapat pelaku *fraud* yang hanya sekedar meningkatkan gaya hidupnya seperti membeli mobil baru, merenovasi rumah menjadi rumah mewah, dan lainlain;
  - e. *Unusual behaviors* yakni tanda ketika seseorang yang baru pertama kali melakukan tindakan *fraud* akan selalu diliputi/dibayangi perasaan takut dan bersalah; dan
  - f. *Tips and complaint* yakni adanya informasi, petunjuk, dan pengaduan hanya merupakan gejala terjadinya *fraud*.

- 2. Mekanisme *whistle blower*. Biegelman, et al. (2012:255) menjelaskan mekanisme *whistle blower* adalah mekanisme deteksi *fraud* sebagai tindak lanjut dari adanya informasi atau pengaduan dari pelanggan dan masyarakat. Picket (2012:156) menjelaskan informasi dan pengaduan adalah sumber penting dalam mendeteksi adanya aktivitas *fraud*; dan
- 3. Metode deduksi dan induksi
  - a. Metode deteksi induktif yaitu salah satu pendekatan yang umum dilakukan dengan menggunakan commercial data mining software, seperti penggunaan aplikasi Audit Command Language (ACL) dan aplikasi Arbutus untuk melihat kejanggalan-kejanggalan dalam database;
  - b. Metode deteksi deduktif. Pendekatan ini berfungsi untuk menetukan apa saja fraud yag dapat terjadi dalam situasi tertentu dan kemungkinan menggunakan teknik dan metode lainnya untuk menentukan apabila fraud tersebut benar-benar ada.

## Laporan Keuangan

Yadiati (2007:51) mendefinisikan laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari uatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal (*full set*) yang terdiri dari: (1) neraca (*balance sheet*); (2) laporan laba rugi (*income statement*); (3) laporan arus kas (*cash flow statement*); (4) laporan perubahan ekuitas (*statement of changes of equity*); dan (5) catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*).

### Tujuan Pelaporan Keuangan

SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) nomor 1 tentang Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise menyebutkan tujuan pelaporan keuangan adalah:

- 1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis;
- 2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman;
- 3. Menaksir aliran kas masuk (future cash flow) pada perusahaan; dan
- 4. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

FAKULTAS EKONOMI

#### Penelitian Terdahulu

Syafdinal (2012) melakukan penelitian dengan judul: Hubungan antara Materialitas, Risiko Audit, dan Bukti Audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara tingkat risiko audit, materialitas yang ditetapkan serta bukti audit yang harus diperoleh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil peniliaian atas risiko audit yang ditetapkan auditor memiliki dampak signifikan terhadap tingkat materialitas dan jumlah bukti yang harus didapatkan. Deade (2012) melakukan penelitian dengan judul: Hubungan Materialitas dan Risiko Audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh apa dampak risiko audit terhadap penetapan materialitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat materialitas ditetapkan setelah tingkat risiko auditi dapat dinilai secara keseluruhan oleh auditor.

#### Kerangka Berpikir

Alur kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan tingkat risiko audit (*audit risk*), risiko bawaan (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*), dan risiko deteksi (*detection risk*) pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 diduga secara bersamaan telah menerapkan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012;

- 2. Penilaian dan penetapan tingkat risiko audit (*audit risk*) pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 diduga telah menerapkan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012;
- 3. Penilaian dan penetapan tingkat risiko bawaan (*inherent risk*) pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 diduga telah menerapkan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012:
- 4. Penilaian dan penetapan tingkat risiko pengendalian (*control risk*) pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 diduga telah menerapkan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012: dan
- 5. Penilaian dan penetapan tingkat risiko risiko deteksi (*detection risk*) pada audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 diduga telah menerapkan metode deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012.

#### METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah simulasi di dalam menguji metode penetapan risiko audit dan metode deteksi atas kemungkinan *fraud* yang terjadi di dalam pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

## Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan bertempat pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut yang berlokasi pada Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado, Provinsi Sulut. Persiapan penelitian dimulai pada bulan April 2013 sesuai dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut. Pelaksanaan penelitian dimulai pada Juni 2013 s.d.Oktober 2013.

#### **Prosedur Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data jawaban kuisioner SPI yang disebarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dalam pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 yang dilakukan oleh kepada beberapa SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian juga menggunakan data penilaian risiko dan penetapan langkah pemeriksaan dalam pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

#### Populasi dan Sampel

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada satu Provinsi dan lima belas kabupaten dan kota pada Provinsi Sulut untuk setiap tahun anggaran, sehingga pada tahun anggaran 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut melakukan Pemeriksaan atas enam belas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sampel pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian adalah Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012.

#### Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yang terdiri dari kumpulan data non angka yang bersifat deskriptif, dan data kuantitatif yang terdiri dari data berupa angka-angka.

- 1. Data Kualitatif yang digunakan terdiri dari:
  - a. Gambaran umum BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut;
  - b. Struktur organisasi dan pembagian tugas dan fungsi setiap bagian;

- c. Peraturan perundangan dan Standar Pemeriksaan yang berkenaan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Format Kertas Kerja Penetapan Nilai Risiko Bawaan (IR);
- e. Format Kertas Kerja Penetapan Nilai Risiko Kontrol (CR);
- f. Format Kertas Kerja Penetapan Nilai Risiko Deteksi (DR); dan
- g. Format Kertas Kerja Penetapan Nilai Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima (AAR).
- 2. Data Kuantitatif yang digunakan terdiri dari:
  - a. Format Kertas Kerja Perhitungan Hubungan antara Risiko Deteksi (DR) dan Lingkup Pengujian (sampel); dan
  - b. Format Kertas Kerja Perhitungan Hubungan antar Masing-Masing Jenis Risiko Pemeriksaan.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- 1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan.; dan
- 2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep.

#### **Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan pengertian tentang risiko pemeriksaan dan *fraud* beserta dengan unsur-unsurnya, pengolahan data yang telah ada sesuai dengan teori yang didapatkan, analisis perbandingan antara jenis risiko pemeriksaan hingga penarikan kesimpulan terhadap risiko pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012. Prosedur perhitungan risiko pemeriksaan pada perencanaan pemeriksaan yang diterapkan akan dibandingkan dengan konsep penilaian risiko pemeriksaan berdasarkan teori untuk menilai apakah perhitungan risiko pemeriksaan yang diterapkan telah sesuai dengan konsep penilaian risiko pemeriksaan menurut teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Hasil Penelitian**

#### Gambaran Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut adalah salah satu kantor perwakilan BPK RI yang berkedudukan di Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 G, ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut berada dibawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut diresmikan pada tanggal 15 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

## Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemeriksaan keuangan negara dibantu oleh Kepala Subauditorat Sulut I serta Kepala Subauditorat Sulut II yang bertugas untuk memberikan pembimbingan (konseling) kepada para Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yang dibawahi oleh masing-masing Subauditorat pada berbagai jabatan PFP dari mulai Anggota Tim Yunior s.d. Ketua Tim Senior. Kepala perwakilan dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahi Sub Bagian SDM, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Hukum dan Humas, Sub bagian Umum dan Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan dalam hal kesekretariatan dan pengelolaan anggaran negara.

## Struktur Organisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut

Struktur organisasi fungsional pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dipimpin oleh seorang Pengendali Mutu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemeriksaan keuangan negara dibantu oleh Pengendali Teknis I serta Pengedali Teknis II yang bertugas untuk memberikan pembimbingan (konseling) kepada para Ketua Tim Senior (KTS) dan Ketua Tim Yunior (KTY) yang nantinya akan memberikan bimbingan kepada Anggota Tim Senior (ATS) dan Anggota Tim Yunior (ATY).

### Penentuan Risiko Audit yang Dapat Diterima (Acceptable Audit Risk/AAR)

Tabel AAR yang ditetapkan pada Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penetapan AAR Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Manado T.A. 2012

	Faktor	Walteria	Kondisi	Bobot Penilaian				
No	raktor	Kriteria	Kondisi	1	2	3		
1	Geografis	Keterjangkauan terhadap entitas. Semakin sulit suatu entitas untuk dijangkau, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Relatif mudah terjangkau, seluruh SKPD berada dalam satu wilayah yang berdekatan			3		
2	Nilai Aset	Besarnya nilai aset dibandingkan dengan entitas sejenis. Semakin besar nilai aset entitas, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Nilai Aset besar, yakni diatas Rp1,5 triliun	1				
3	Anggaran yang Dikelola	Besarnya anggaran yang dikelola dibandingkan dengan entitas sejenis. Semakin besar nilai anggaran entitas, maka bobot penilaiannya kecil	ngkan dengan entitas sejenis. nilainya mencapai diatas 900 n besar nilai anggaran miliar					
4	Tingkat ketergantungan pengguna terhadap laporan keuangan	antungan ketergantun <mark>gan</mark> pengguna atas Pu <mark>sat,</mark> Pemerintah Provinsi, Ina laporan keua <mark>ng</mark> an entitas, maka dan media masa, sangat Iaporan bobot penilaiannya kecil memperhatikan opini LKPD		1				
5	Jumlah satker	Semakin banyak juml <mark>ah satker yang</mark> dimiliki suatu entitas pelaporan, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Jumlah satker besar, yakni diatas 120 satker	1				
6	Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	Semakin buruk hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Opini dua tahun terakhir buruk yaitu Tidak Wajar dan Disclaimer	1				
7	Going Concern	Semakin rendah tingkat kepastian going concernya, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Tidak ada permasalahan /kejadian dan kebijakan pemerintah pusat yang signifikan yang mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan			3		
8	Integritas manajemen	Semakin rendah tingkat integritas manajemennya, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Banyaknya penyimpangan atas keuangan daerah tahun lalu menunjukkan integritas manajemen pimpinan daerah rendah	1				
9	Sistem Informasi yang digunakan	Semakin buruk sistem informasi entitas, maka bobot penilaiannya semakin kecil	Sudah diterapkan SIMDA untuk penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan		2			
		Sub Total		6	2	6		
			14					
Kesimpulan Tingkat AAR						Rendah (1%)		

## Penilaian Risiko Bawaan (Inherent Risk/IR)

Tabel IR yang ditetapkan pada Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 adalah:

Tabel 2. Penetapan IR pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado

No	Faktor-faktor Spesifik akun	Kriteria	Input	Akun-akunnya	Siklus Terkait	Bobot Penilaian		
	Spesifik akuli			· ·		1	2	3
1	Sifat bisnis/industri entitas.	Semakin kompleks struktur bisnis entitas maka semakin tinggi risiko bawaan akun- akun tertentu.	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Penerimaan PAD, belanja barang,	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan		<del>-</del>	3
2	Hasil pemeriksaan sebelumnya.	Semakin banyak temuan pada tahun sebelumnya atas akun tersebut, maka semakin tinggi risiko bawaannya	Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.	belanja modal Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Aset tetap tanah, Aset lain-lain, pendapatan retribusi, belanja pegawai, belanja barang, belanja	penghapusan aset Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan			3
3	Integritas personel kunci.	Semakin rendah kompetensi dan pengalaman personil entitas, maka semakin	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	modal Penerimaan PAD, belanja barang, belanja modal	penghapusan aset Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas,		2	
		tinggi risiko bawaannya.	DID	IKAND	perolehan dan penghapusan aset			
4	Penugasan pertama vs penugasan berulang.	Penugasan pertama pemeriksaan atas suatu entitas akan cenderung ditetapkan risiko bawaan yang lebih tinggi daripada entitas yang telah diperiksa sebelumnya.	Pemahaman entitas, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya	Penerimaan PAD, belanja barang, belanja modal	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan penghapusan aset	1		
5	Hubungan dengan pihak- pihak terkait.	Semakin entitas bertransaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka semakin rentan transaksi dan akun terkait.	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	Belanja Bantuan sosial kepada instansi vertikal; Belanja bantuan partai politik	belanja dan pengeluaran kas		2	
6	Jenis-jenis transaksi (rutin/non-rutin) dan tingkat kompleksitasnya.	Semakin tidak sering transaksi tersebut, maka semakin tinggi risikonya atau semakin kompleks transaksi, maka semakin tinggi risiko bawaannya.	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	Penerimaan dan Pengeluaran PFK, lain-lain PAD yg sah, belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja modal	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan penghapusan aset			3
7	Dorongan dan motivasi klien.	Semakin rendah dorongan dan motivasi dari pimpinan entitas, maka semakin tinggi risikonya	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	Penerimaan PAD, belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja modal	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan		2	
8	Tingkat subyektivitas ats pertimbangan yang disyaratkan standar akuntansi.	Semakin subjektif akun tersebut, maka semakin tinggi risikonya.	Pemahaman entitas, Pemahaman Proses Bisnis	Piutang pajak (terutama dari pajak daerah yang menggunakan self assessment/ MPS	Penghapusan aset Pendapatan dan penerimaan kas			3
9	Tingkat kerentanan terhadap pencurian/ penyalahgunaan aset.	Beberapa jenis aset mempunyai kerentanan tinggi karena mudah dibawa/dicuri dan mempunyai nilai ekonomis tinggi .	Laporan inspektorat dan laporan internal SKPD atas kehilangan	Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Aset tetap peralatan dan mesin, persediaan	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas, perolehan dan penghapusan aset	1		
10	Faktor-faktor terkait dengan salah saji dikarenakan adanya kecurangan terhadap laporan keuangan.	Semakin rentan siklus/akun terhadap manipulasi atau kerugian pada saat dilakukan prosedur analitis, maka semakin tinggi risiko bawaannya.	Prosedur analitis	Utang PFK, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan	Pendapatan dan penerimaan kas, belanja dan pengeluaran kas			;
		, <b>,</b>	Sub total			2	6	1:
			TOTAL		<u> </u>		23 lang (7	
			Kesimpulan Tingkat					/ 11º/- '

#### Penilaian Risiko Pengendalian (Control Risk/CR)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut menerapkan strategi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 berdasarkan risiko pemeriksaan (*risk based audit*) sehingga dalam menetukan tingkat risiko pengendalian terdapat dua pendekatan yaitu risiko pengendalian tingkat akun dalam laporan keuangan dan risiko pengendalian berdasarkan siklus bisnis entitas. Penentuan risiko pengendalian tingkat akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 ditentukan berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2011 atau merupakan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Hasil ilustrasi tabel tersebut diaplikasikan terhadap data hasil pemeriksaan tahun sebelumnya atau hasil pemeriksaan pendahuluan pada Pemerintah Kota Manado T.A. 2012, maka penetapan nilai CR adalah rata-rata senilai 3 atau rendah (70%).

Penentuan risiko pengendalian berdasarkan siklus bisnis entitas dilakukan dengan metode COSO melalui kuisioner kontrol internal yang disebarkan oleh pemeriksa kepada pejabat yang berwenang dan kompeten di lingkungan auditi. Penggunaan metode COSO ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana pada Pasal 3 menyebutkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada metode COSO. Hasil ilustrasi tabel tersebut diaplikasikan terhadap jawaban kuisioner SPI yang telah disebarkan saat pemeriksaan pendahuluan pada Pemerintah Kota Manado T.A. 2012, maka penetapan nilai CR adalah rata-rata senilai 3 atau rendah (70%).

#### Pembahasan

Hasil penentuan risiko audit yang dapat diterima (AAR/AR), risiko bawaan (IR), dan penentuan risiko pengendalian (CR) didapatkan risiko audit yang dapat diterima (AAR/AR) rendah (1%), risiko bawaan (IR) sedang (66%) dan risiko pengendalian (CR) sedang (70%) sehingga risiko deteksi (DR) rendah (2%) dengan lingkup pengujian mendalam dan materialitas rendah sehingga mengakibatkan jumlah bukti pemeriksaan yang harus dikumpulkan adalah besar/banyak.

Pemeriksa akan menetapkan tingkat materialitas (planning materiality/PM) dan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima (tolerable errors/TE) yang akan ditetapkan nilainya untuk seluruh akun dalam laporan keuangan berdasarkan penilaian risiko (risk assessment) yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian pemeriksa menetapkan program pemeriksaan yang berisi langkahlangkah pemeriksaan yang dirancang untuk menguji apakah terdapat kesalahan saji (misstatement) atau kecurangan (fraud). Program pemeriksaan dirancang secara terperinci untuk setiap akun dalam laporan keuangan karena sifat dan risiko dari masing-masing akun berbeda antara satu dengan lain.

Metode penilaian dan penetuan risiko audit dapat diterima (AAR/AR), risiko bawaan (IR), dan risiko pengendalian (CR) telah memperhitungkan faktor yang digunakan dalam mendeteksi risiko kecurangan khususnya teknik fraud red flags pada jenis accounting anomalies dan analitycal anomalies dimana ditemukan kondisi akuntansi yang tidak sebagaimana biasanya menjadi sinyal bagi auditor akan kemungkinan terjadinya fraud, seperti kesalahan dalam penjurnalan, ketidakakuratan dalam buku besar, bukti pendukung yang tidak lengkap, serta transaksi atau peristiwa yang terjadi pada tempat atau waktu yang tidak biasa. Pemeriksa telah menerapkan teknik deteksi atas risiko kecurangan khususnya teknik fraud red flags pada jenis internal control weaknes serta teknik deteksi whistle blower dalam menentukan risiko pengendalian (CR) berdasarkan siklus bisnis entitas dimana berdasarkan kuisioner COSO yang diberikan, pihak berwenang dapat melakukan pengaduan terkait bentuk pelanggaran dan fraud yang terjadi.

#### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Penerapan rumusan risiko audit pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012 atas telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan praktik yang sehat (*best practice*); dan
- 2. Pemberlakuan rumusan risiko audit dapat meminimalisir risiko deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012. Hal ini tercermin dari penerapan strategi audit pada tingkat risiko deteksi serta program pemeriksaan yang memuat langkah-langkah pemeriksaan yang didesain sesuai dengan hasil perhitungan rumusan risiko pemeriksaan sehingga diharapkan langkah-langkah pemeriksaan tersebut akan dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado T.A. 2012. Strategi audit dan program pemeriksaan yang ditetapkan telah sesuai dengan teknik deteksi atas risiko kecurangan khususnya Fraud Red Flags (bendera merah kecurangan) pada jenis red flags accounting anomalies, internal control weakness dan analytical anomalies. Strategi audit dan program pemeriksaan telah menerapkan mekanisme whistle blower pada saat melakukan wawancara dengan pihak berwenang pada entitas yang diperiksa.

#### Saran

Rekomendasi penulis kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut sebagai berikut:

- 1. Pemeriksa perlu mempertimbangkan hasil observasi terhadap pengendalian internal entitas dalam menerapkan kuisioner kontrol internal dan metode ilustratif COSO yang juga menilai kuisioner dari entitas yang diperiksa; dan
- 2. Pendidikan dan pelatihan lebih lanjut perlu dilaksanakan kepada auditor terkait langkah-langkah penilaian dan penetapan risiko pemeriksaan terhadap entitas yang diperiksa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biegelman, Martin T, Joel T. Bartouw. 2012. Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control. John Willey and Sons, Ltd. United Kingdom.
- Boynton, William C, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing*. Jilid I. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Guy, dan M, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters. 2001. Auditing. Jilid II. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Deade, Yumin. 2012. Hubungan Materialitas dan Risiko Audit. *Artikel*. <a href="http://hyumindheade.blogspot.com">http://hyumindheade.blogspot.com</a>. Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses: 20 Mei 2013. Hal. 1.
- Kranacher, Mary-Jo, Richard A. Rilley Jr, and Joseph T. Wells. 2011. Forensic Accounting and Fraud Examination. John Willey and Sons, Ltd. United Kingdom.
- Syafdinal, N. 2012. Hubungan Antara Materialitas, Risiko Audit, dan Bukti Audit. *Artikel*. <a href="http://www.slideshare.net/ncapsyafdinal/hubungan-antara-materialitas-risiko-audit-dan-bukti-audit.">http://www.slideshare.net/ncapsyafdinal/hubungan-antara-materialitas-risiko-audit-dan-bukti-audit.</a> PT. Dirgantara Indonesia. Jakarta. Diakses: 13 Mei 2013. Hal.10.
- Picket, K.H. Spencer. 2012. Fraud Smart. John Willey and Sons, Ltd. United Kingdom.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
- Yadiati, Winwin, 2007. Teori Akuntansi: Suatu Pengantar. Kencana, Jakarta.